

Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Aspek Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan

Fitri Manhuri^{1*}, Santrinita Trhessya Jumame², Sunarmi³

¹Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo

²Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Saint Paul Sorong

³Program Studi Akuntansi Universitas Aisyah Pringsewu

Abstrak

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria yang relevan dan dapat diandalkan. Laporan keuangan mempunyai kredibilitas jika mempunyai nilai prediktif atau umpan balik dan disajikan tepat waktu. Namun, kriteria yang relevan terpenuhi jika laporan keuangan dapat diuji, netral, dan andal, sehingga pelaporan memerlukan sumber daya keuangan untuk mengoperasikan sistem yang ada. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui observasi atau pengamatan langsung dari perusahaan, baik itu melalui observasi, kuisioner dan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil pengisian kuisioner oleh responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan bendahara pada BPKAD Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Kata Kunci: Pengawasan, Informasi Keuangan, Pengendalian Intern

*Corresponding Author : fitrimanhuri20@gmail.com

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik semakin berkembang dan mengalami kemajuan karena meningkatnya persyaratan transparansi dan akuntabilitas publik pada badan sektor publik dan lembaga terkait. Upaya khusus untuk menerapkan transparansi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keuangan negara, baik dalam penyelenggaraan negara maupun daerah, adalah dengan penyampaian laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam hal akuntabilitas dan administrasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan Negara dan Penyampaian Laporan Pelaporan oleh Kedua Negara. dan pemerintah provinsi. dalam bentuk laporan keuangan. Kegagalan laporan keuangan pemerintah untuk memenuhi indikator-indikator yang ditentukan menyebabkan kesalahan dalam keputusan alokasi sumber daya dan selanjutnya berdampak pada kerugian daerah, kelemahan administratif, kekurangan pendapatan, inefisiensi dan kehabisan sumber daya. Dalam standar akuntansi negara (SAP), laporan keuangan harus mematuhi Peraturan Pemerintah Republik no. 71 Tahun 2010 yaitu: relevan, dapat diandalkan, sebanding dan dapat dipahami.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria yang relevan dan dapat diandalkan (Musriani et al., 2022). Laporan keuangan mempunyai kredibilitas jika mempunyai nilai prediktif atau umpan balik dan disajikan tepat waktu. Namun, kriteria yang relevan terpenuhi jika laporan keuangan dapat diuji, netral, dan andal, sehingga pelaporan memerlukan sumber daya keuangan untuk mengoperasikan sistem yang ada. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan staf yang berkualitas tinggi dan sistem pengendalian internal yang baik (Munzir, Andriyan, Ramadani, et al., 2023). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat diperlukan untuk memahami keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Masyarakat sebagai agen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam seluruh kegiatan pemerintahan di segala sektor, yang peranannya harus didasarkan pada kemampuan sumber daya manusia dan pengendalian internal yang digunakan pemerintah untuk menghasilkan produk yang handal dan berkualitas (Munzir, Andriyan, & Hidayat, 2023; Rini et al., 2022). tepat waktu. laporan keuangan. Dapat diartikan bahwa sebenarnya keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan sangat bergantung pada sumber daya manusia karena hal itulah yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan (Wulandary & Dfinubun, 2021), (Munzir, Rini, et al., 2021), (Munzir, Andriyan, & Hidayat, 2023).

Pengendalian merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuan tertentu (Munzir, 2020). Pengendalian internal merupakan suatu cara mengarahkan, mengendalikan dan mengukur sumber daya suatu organisasi dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan memenuhi kebutuhan penggunaanya. Informasi yang berguna bagi pengguna adalah informasi berkualitas tinggi yang mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, pemerintah kota harus memperhatikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah kota ketika merencanakan, memantau dan mengambil Keputusan.

Pengendalian keuangan daerah tidak hanya menentukan pengendalian internal, namun juga kualitas pelaporan keuangan daerah (Andriyan, 2021; Andriyan et al., 2022). Karena yang terakhir, proses pengendalian keuangan daerah diperlukan untuk mencapai keyakinan yang cukup terhadap tercapainya tujuan pengelolaan daerah, yang tercermin dalam keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan,

serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Andriyan et al., 2023a; Rajab et al., 2022, 2023).

Pengawasan keuangan daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang diterbitkan pada tahun 2011, pengawasan mengacu pada proses operasional yang bertujuan untuk menjamin berfungsinya pemerintahan Negara. secara efektif dan efisien sesuai rencana dan peraturan. Suatu sistem akan berfungsi dengan baik bila terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai rencana dan mendukung pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Dalam penyelenggaraan APBD harus ada pengendalian agar semua proses berjalan lancar demi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas (Andriyan et al., 2023b; Elden Palyama et al., 2023; Irham et al., 2023; Supardi et al., 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah diselidiki, misalnya (Herawati, 2023; Johan & Rahmawati, 2023; Liu, 2021; Ren, 2022; Tajuddin et al., 2023), yaitu untuk mengetahui bukti empiris bahwa departemen SDM akuntansi/manajemen keuangan di Kabupaten Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui. Secara jumlah, beberapa unit kerja yang ada hanya memiliki satu akuntan, yakni. kepala subbagian akuntansi/manajemen keuangan. Di sisi lain, dari segi kualifikasi, sebagian besar pegawai subunit akuntansi/manajemen keuangan kurang memiliki pelatihan akuntansi. Uraian tugas dan tanggung jawab sub bagian Akuntansi/Manajemen Keuangan saat ini masih terlalu umum (belum terdefinisi dengan jelas) Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pramudyawardhani & Munari, 2023; Saghafi & Amirabadi, 2016; Surya Atmaja et al., 2023; Widajatun & Kristiastuti, 2020) yang secara empiris menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sudah memadai dan kompetensi juga memberikan pengaruh besar (Hidayat et al., 2023; Nursyamsi et al., 2023).

Secara jumlah, beberapa unit kerja yang ada memiliki beberapa akuntan, dan dari segi kualifikasi, sebagian besar pegawai pada sub unit akuntansi/manajemen keuangan memiliki latar belakang pelatihan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi subbagian Akuntansi/Manajemen Keuangan saat ini didefinisikan dengan jelas. Perbedaan ini membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal dan pengendalian keuangan terhadap nilai informasi dalam pelaporan keuangan BPKAD Kabupaten Luwu.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Teori dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) merupakan perkembangan dari teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk menjelaskan apabila perilaku tersebut disebabkan pihak internal ataupun eksternal (Robbins and Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian sesuai kondisi (Difinubun & Hidayat, 2021).

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam model penelitian ini Pelaporan Keuangan Pemda dapat dikaitkan dengan Tindakan Aparatur Sipil Negara dalam membuat pelaporan keuangan Instansi kepada masyarakat. Tindakan atau pemikiran seseorang untuk membuat pelaporan keuangan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal (Difinubun & Isnaini, 2022) Faktor Internal yang mempengaruhi Pelaporan

Kuangan yaitu Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Internal Keuangan Daerah sedangkan Faktor eksternal yang mempengaruhi Pelaporan Keuangan yaitu Sistem Pengawasan Eksternal Keuangan Daerah (Difinubun et al., 2022).

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan mencakup semua aspek yang terkait dengan penyajian dan transmisi informasi keuangan. Aspek tersebut meliputi institusi yang terlibat (seperti penyusunan standar, pemeriksa pemerintah atau pasar modal, asosiasi profesi dan unit pelaporan), peraturan yang berlaku, termasuk GABU (Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum) (Agus Triansyah et al., 2023; Munzir, 2023; Rismawati et al., 2023). Laporan keuangan pada hakikatnya adalah laporan suatu instansi pemerintah yang memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Difinubun & Fatimah, 2023). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan pendapatan (Difinubun & Fatimah, 2023), pengeluaran (Difinubun & Hidayat, 2021), transfer dan pembiayaan terhadap anggaran yang telah ditentukan (Difinubun & Gudono, 2021), menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas entitas pelapor dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Munzir et al., 2022).

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan PP No 60/2008 mengenai tertib penendalian intern bahgia adalah kiat terstruktur hadirat kesibukan dan agenda yang dilakukan secara melintas menggabak oleh panduan dan seluruh tubuh karyawan kepada memasrahkan pegangan menyedang pangkal tercapainya korban senat memintasi agenda yang berguna dan efesien, kendalan pewartaan keuangan, pengamanan harta negara, dan kepatuhan terhadap tertib perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengadakan suatu resam kepada mengarahkan, mengawasi, dan mengorek kausa kesudahan suatu senat, menimbrung berkedudukan penting bagian dalam penolakan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terbentuk pangkal kebaikan dan khitah yang digunakan bagian dalam menguasai tujuan dan memayungi atau menyimpan petunjuk keuangan yang andal, menimbrung memayungi ditaatinya peraturan dan tertib yang berlaku (Difinubun et al., 2022). Pengukuran sebab ini mengabdikan motor kuesioner, pakai kaca tangga Likert lima poin. Responden diminta kepada mencurahkan sepaham atau ketidaksetujuannya terhadap kesulitan yang diajukan sepaham pakai peri yang sesungguhnya (Munzir, Fajar Nurfatimah, et al., 2021). Pengendalian intern digunakan menjelang menerima suruhan peri bagaimana suatu terjamah dan menggiatkan ditaatinya jasa sabda yang beres ditetapkan (Munzir, 2020). Pengendalian intern tidak digunakan menjelang mengeradikasi harapan kelahiran kekeliruan dan kecurangan, tetapi tambah adanya resolusi intern yang hormat akan memacul resiko kelahiran unit tertulis sehingga bisa tergesa-gesa ketahuan dan diatasi secara awal agar tidak memunculkan kerugian. praktik resolusi intern bisa dilakukan sebelum, selma dan sesudah kelahiran rencana yang tujuannya menjelang menguji ketelitian dan kecakapan petunjuk akuntansi dan menyelamatkan kesentosaan modal getah perca penyandang dana dan pemaksa yang ditanamkan bagian dalam perusahaan dan akan membentuk tuntutan keuangan yang bisa dipercaya. Sistem resolusi intern (SPI) mempunyai keefektifan menjelang menerima ajaran yang menyedang hisab tercapainya efektifitas dan efisiensi bagian dalam ikhtiar akuntansi terutama bagian dalam membuat kecakapan keuangan.

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai (Randisa & Andriyan, 2022). Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan

merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan ekstern (external control) (Sanaba et al., 2022).

Hipotesis

Pengaruh Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Teori atribusi menjelaskan hubungan Pengendalian Internal Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Menurut teori atribusi, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan oleh Pemerintah dipengaruhi faktor Internal dan Eksternal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi nilai Informasi Pelaporan Keuangan yaitu Pengendalian Internal Akuntansi. Berdasarkan temuan penelitian Harahap dan Ahmad Jufri (2016), Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu (2017), Wirmi Eka Putra (2017), dan Harlinda (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan penelitian ini yaitu:

H1 : Pengendalian Internal Akuntansi berpengaruh Positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Teori atribusi menjelaskan hubungan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. Menurut teori atribusi, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan oleh Pemerintah dipengaruhi faktor Internal dan Eksternal. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi nilai Informasi Pelaporan Keuangan yaitu Pengawasan Keuangan Daerah. Berdasarkan temuan penelitian Fitirni Mansur, Eko Prasetyo dan Reyka Maiyarni (2017), Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan penelitian ini yaitu:

H2 : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian berjenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer (Badarudin et al., 2022; Sutikno et al., 2022);(Rachmadana et al., 2022) yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil pengisian kuisioner oleh responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan bendahara pada BPKAD Kabupaten Luwu. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada kantor BPKAD Kabupaten Luwu sebanyak 151 orang. Sampel penelitian yaitu kepala dan staf bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan bendahara yang berjumlah 86. Pengambilan sampel (sampling method) dilakukan secara purposive sampling (Iskandar et al., 2023) berdasarkan kriteria yaitu:(1) Pegawai/Staf BPKAD, (2) Pegawai yang bekerja dibidang keuangan,(3) Bendahara. Metode pengumpulan data yaitu (1) Angket atau kuesoiner,(2) Pengamatan (observase) dan (3) Wawancara (interview). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Dengan persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

a	= konstanta
b ₁ ,b ₂	= koefisien garis regresi
X ₁	= Sistem pengendalian intern
X ₂	= Pengawasan Keuangan daerah
Y	= Nilai informasi pelaporan keuangan

E = Standar eror

Pengujian lainnya dilakukan dengan Uji t dan uji F. Uji t (uji parsial) dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Difinubun & Isnaini, 2022). Uji F (uji simultan) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Difinubun & Hidayat, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.dev
Pengendalian IA	63	9	34	29.76	3.44
Pengawasan KD	63	7	30	26.17	3.20
NIP Keuangan Daerah	63	11	39	34.52	3.66
Valid N (Listwise)	63				

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Pengendalian Intern Akuntansi yang merupakan variabel independen memiliki nilai minimum 9, nilai maksimum 34, nilai rata-rata (mean) 29,76 dan standar deviasinya 3,44. Pengawasan Keuangan Daerah yang merupakan variabel independen memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 30, nilai rata-rata (mean) 26,17 dan standar deviasinya 3,20. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah yang merupakan variabel dependen dengan nilai minimum sebesar 4,02, nilai maksimum sebesar 4,12, nilai mean sebesar 4,07 dan standar deviasi sebesar 0,04. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hasil statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata ukuran pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah pada nilai informasi pelaporan keuangan daerah lebih kecil dibanding rata-rata ukuran kualitas sumber daya manusia pada variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.566	1.249		2.856	.006
Pengendalian IA	.342	.122	.322	2.798	.007
Pengawasan KD	.190	.076	.166	2.498	.015

a. Dependent Variable: NIP Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Dari hasil tabel diatas, maka adapun penjelasannya dapat diketahui dengan menunjukkan hasil uji t sebagai berikut:

1. Pengendalian Intern Akuntansi (X1). Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,007 < 0,05$). Hal ini berarti Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini mengakibatkan hipotesis 3 diterima.
2. Pengawasan Keuangan Daerah (X4). Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh

signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,015 < 0,05$). Hal ini berarti Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini mengakibatkan hipotesis 4 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian variabel independen pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pengendalian intern akuntansi, maka akan semakin meningkat nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ketika pengendalian intern akuntansi dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada maka nilai informasi pelaporan keuangan daerah akan senantiasa menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang baik dan benar serta sesuai harapan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Ahmad Jufri (2016), Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu (2017), Wirmi Eka Putra (2017), dan Harlinda (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian variabel independen pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pengawasan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ketika pengawasan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada maka nilai informasi pelaporan keuangan daerah akan senantiasa menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang baik dan benar serta sesuai harapan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Mansur, Eko Prasetyo dan Reyka Maiyarni (2017), Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Secara simultan menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.
2. Secara parsial menunjukkan bahwa Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Saran

1. Kantor BPKAD Kabupaten Luwu harus senantiasa mempertahankan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah yang baik karena hal ini menjadi perhatian keunggulan dan tindakan yang positif demi mempertahankan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah yang baik dan benar serta menjadikan instansi tersebut dapat dipercaya dari pihak dalam maupun pihak luar yang berkepentingan.
2. Kantor BPKAD Kabupaten Luwu harus selalu meningkatkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah agar senantiasa terjaga kepercayaan dari pihak dalam maupun pihak luar instansi serta sekaligus tanggung jawab instansi untuk senantiasa bersikap akuntabel dan transparan.

3. Bagi para penulis selanjutnya agar kiranya melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan informasi tentang nilai informasi pelaporan keuangan daerah, guna untuk melakukan penelitian-penelitian yang kebaruan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triansyah, F., Ayu Suryaningrum, D., Trihudyatmanto, M., Pranata Mulya, N., Gultom, A. W., Sismar, A., Munzir, M., Rusliana Muhamad Saleh, E., Lintang Rachmadana, S., Pahmi, P., Amam, A., & Sabaria, S. (2023). *Studi Kelayakan Bisnis* (Vol. 1).
- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 3(1), 47–54. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12847>
- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, H. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jsip: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17–24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023a). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 1–18.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023b). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 1-1–18.
- Badarudin, M. I., Arzad, M., Manurung, T., Lahalo, F. F., Wattimena, L., Matahelumual, F., Hamzah, H., Rustamadji, R., Munzir, M., Hafel, M., Syahadat, E. F., J Sapari, L. S., Poltak, H., & Fahrizal, A. (2022). Perikanan Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat: Status Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem (P3e) Pada Domain Sosial. *Jurnal Grouper*, 13(2), 151–162.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Fair Unimuda*, 2(1), 34–45.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Fair Unimuda*, 1(1), 62–91.
- Difinubun, Y., & Hidayat, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kpp Madya Makassar. *Fair Unimuda*, 1(1), 17–28.
- Difinubun, Y., & Isnaini, P. N. (2022). Determinasi Sanksi Dan Kualitas Dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Di Kpp Pratama Kota Sorong. *Fair Unimuda*, 2(2), 58–70.
- Elden Palyama, F., Andriyan, Y., Ery Kusmiadi, M., & Pemerintahan, I. (2023). Evaluasi Pelayanan Asn Terhadap Tugas Pokok Pegawai Di Kelurahan Klademak Distrik Sorong Kabupaten Luwu. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 27–35.
- Herawati, H. (2023). The Implementation Of Financial System Information Toward The Function Of Regional Financial Supervision On Regional Financial Management In Bungo Regency. *Journal On Education*, 5(2), 4259–4269.
- Hidayat, R., Munzir, M., & Andriyan, Y. (2023). Anlisis Pemberitaan Infotainment Dalam Perspektif Jurnalis Tribun Timur. *Kommunal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–7.
- Irham, I., Wijaya Syam, A., & Andriyan, Y. (2023). Analisis Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Smartfren Telecom Makassar. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 52–63.
- Iskandar, M. R., Nasir, N., Sismar, A., & Difinubun, Y. (2023). Kinerja Keuangan Perusahaan:

- Telaah Rasio Keuangan (Studi Pada Pt. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros). *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 22–27.
- Liu, B. (2021). Research On Enterprise Financial Management Supervision Mode Based On Data Mining. *Journal Of Physics: Conference Series*, 1881(4), 1–6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1881/4/042074>
- Munzir, M. (2020). Pelatihan Akuntansi Dan Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Bumdes Di Desa Tanjong, Kabupaten Luwu. *Jurnal Abdimasa: Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 21–25.
- Munzir, M. (2023). Tingkat Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Pemahaman Sak Emkm (Studi Umkm Pada Kabupaten Sorong). *Konferensi Ilmiah Akuntansi X*, 1–11.
- Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer Goods: Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi Oleh Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(2), 153–165. <https://doi.org/10.24853/Jago.3.2.153-165>
- Munzir, M., Andriyan, Y., Ramadani, F., Jumiaty Syafruddin, R., Fakdawer, E., & Jonmer Tumana, R. (2023). Pelatihan Laporan Keuangan Berbasis Rumah Ibadah Pada Distrik Salawati Kabupaten Sorong. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 7(5), 4712–4719. <https://doi.org/10.31764/Jmm.V7i5.17139>
- Munzir, M., Fajar Nurfatimah, U., & Nisak, K. M. (2021). Pengaruh Opinion Shopping, Dan Debt Default Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 1(1), 1–16.
- Munzir, M., Felda Pramita, D., & Way, A. (2022). Pengaruh Struktur Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(1), 46–56.
- Munzir, M., Rini, T. H. C., & Azis, M. (2021). Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 5(1), 1–11.
- Musriani, M., Lintang Rachmadana, S., & Munzir, M. (2022). Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kelancaran Finansial Dalam Menunjang Kinerja Usaha Pada Pt. Pln (Persero) Up3 Sorong Papua Barat. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(2), 8–17.
- Nursyamsi, N., Juminah, J., & Hidayat, R. (2023). Minat Dan Kepuasan Mahasiswa Fhisipol Unimuda Sorong Menonton Program Talk Show Mata Najwa Di Youtube. *Kommunal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–13.
- Pramudyawardhani, M., & Munari, M. (2023). The Influence Of Transparency, Accountability, Supervision, And Hr Competence On Apbd Management At Bpkad Surabaya City. *International Journal Of Economy, Education, And Entrepreneurship*, 3(2), 409–422. <https://doi.org/10.53067/Ije3.V3i2>
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., & Muhamad, S. (2022). Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batubara Pasca Pemberlakuan Uu No 3 Tahun 2020. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 2(1), 32–46.
- Rajab, A. M., Andriyan, Y., Muhamad, S., & Supardi, E. (2023). Legalitas Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 36–51.
- Rachmadana, S. L., Putra, S. A. A., & Difinubun, Y. (2022). Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perkonomian. *Fair Unimuda*, 2(2), 71–82.
- Randisa, A. R., & Andriyan, Y. (2022). Analisis Peran Media Sosial Twitter Ruang Guru Sebagai Alternatif Sarana Pendidikan Di Indonesia Dalam Perspektif Pengguna Aktif Twitter Ruang Guru Melalui #Ruangguru. *Jurnal Adhikari*, 1(4), 162–167. <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/Adhikari>
- Ren, S. (2022). Optimization Of Enterprise Financial Management And Decision-Making

- Systems Based On Big Data. *Journal Of Mathematics*, 2022, 1–11.
<https://doi.org/10.1155/2022/1708506>
- Rini, T. H. C., Khaerani, A., & Munzir, M. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Bumh Di Kabupaten Luwu. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(1), 57–69.
- Rismawati, R., Sari, N., Riyanti, R., Sahrir, S., Supri, Z., Syamsuddin, S., & Munzir, M. (2023). *Akuntansi Keuangan Syariah: Relevansi Standar Akuntansi Syariah Dalam Menjalankan Bisnis Syariah* (Vol. 1). <https://lppi.umpalopo.ac.id/>
- Saghafi, M., & Amirabadi, A. (2016). The Study Of Supervision And Control In Islamic Financial Management. *Asian Economic And Financial Review*, 6(7), 404–415.
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2016.6.7/102.7.404.415>
- Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan: Kompensasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(2), 83–96.
- Supardi, E., Andriyan, Y., Sanaba, H. F., & Pemerintahan, I. (2023). Pengaruh Servant Leadersip Terhadap Kinerja Pegawai. *Jppap: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 3(1), 64–72.
- Surya Atmaja, D., Fachrurazi, F., Abdullah, A., Fauziah, F., Nur Zaroni, A., & Yusuf, M. (2023). Actualization Of Performance Management Models For The Development Of Human Resources Quality, Economic Potential, And Financial Governance Policy In Indonesia Ministry Of Education. *Multicultural Education*, 9(1), 1–15.
- Sutikno, A. Y. W., Farid, M., Muhamad, S., Adriyan, Y., Munzir, M., Hidayat, R., & Shofia, A. (2022). Sekolah Advokasi Pemuda Papua (Sa Papua) Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Radikalisme Berbasis Sara. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 81–93.
- Tajuddin, T., Ode Suriadi, L., Arifuddin, A., & Intihanah, I. (2023). Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (Jpep)*, 8(2), 183–194.
<https://journal.uho.ac.id/index.php/jpep>
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect Of Regional Financial Supervision, Accountability And Transparency Of Regional Financial Management On Local Government Performance. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 3(4), 2966–2974.
<https://doi.org/10.33258/Birci.V3i4.1319>